



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

INDEPENDENSI

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat Nya serta kerja keras jajaran BPK Perwakilan provinsi Sumatera Utara, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dapat tersusun. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPK dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan BPK sesuai dengan alokasi dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan BPK untuk Tahun 2022. Laporan ini merupakan laporan tahun kedua pada periode Renstra 2020-2024.

Dalam melaksanakan mandatnya BPK telah menetapkan visi dalam Renstra BPK 2020-2024 yaitu “Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara”. Dalam upaya untuk mencapai visi tersebut BPK mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itu BPK telah menetapkan tiga misi yaitu: (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat Undang-undang Dasar mengemban tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi BPK kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja BPK dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 belum sepenuhnya dapat mencapai seluruh target IKU. Untuk itu, segenap jajaran pejabat struktural dan staf di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terus berkomitmen untuk senantiasa berbenah diri dalam memperbaiki kinerja di Tahun 2023.

Semoga LAK Tahun 2022 dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Medan, Januari 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Kepala Perwakilan,**

**Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
NIP 196910011996031001**

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1
3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.	4
4. Sumber Daya.....	6
a. Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	6
b. Sumber Daya Keuangan.....	8
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA.....	10
1. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ..	10
2. Target Kinerja	11
a. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .	11
b. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA.....	14
1. Hasil Evaluasi AKIP.....	14
2. Capaian Kinerja.....	15

a.	IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.....	19
b.	IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	20
c.	IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	21
d.	IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.....	22
e.	IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	23
f.	IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.....	24
g.	IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.....	25
h.	IK 8 Hasil Evaluasi AKIP.....	25
i.	IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.....	26
j.	IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.....	27
k.	IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.....	28
l.	IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	29
m.	IK 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.....	30
3.	Analisis Efisiensi.....	32
a.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	32
b.	Pengelolaan BMN	32
c.	Efisiensi Penggunaan Anggaran	33
4.	Perubahan Budaya Kerja.....	33
5.	Realisasi Anggaran.....	34
6.	Penghargaan	35
BAB IV	PENUTUP.....	36
Lampiran		

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 3.1	Indikator Kinerja, Target dan Capaian IK Tahun 2022	16
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi IK Tahun 2022 dengan Dua Tahun Sebelumnya.....	17
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi IK Tahun 2022 dengan Target Periode Renstra 2020-2024	18
Tabel 3.4	Komponen IK 1	19
Tabel 3.5	Perkembangan Capaian IK Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.....	20
Tabel 3.6	Perkembangan Capaian IK Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.....	21
Tabel 3.7	Perkembangan Capaian IK Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	21
Tabel 3.8	Perkembangan Capaian IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.....	22
Tabel 3.9	Perkembangan Capaian IK Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.....	23
Tabel 3.10	Perkembangan Capaian IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.....	25
Tabel 3.11	Perkembangan Capaian IK Hasil Evaluasi AKIP.....	26
Tabel 3.12	Rincian Nilai IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.....	26
Tabel 3.13	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	27
Tabel 3.14	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	28
Tabel 3.15	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	28

Tabel 3.16	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	29
Tabel 3.17	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	30
Tabel 3.18	Rincian Nilai Komponen EKA di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	31
Tabel 3.19	Rincian Nilai Komponen EPA/IKPA di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	31
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	34

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	7
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	7
Gambar 2.1	Visualisasai Renstra BPK 2020-2024	10
Gambar 2.2	Visualisasai Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2024	11
Gambar 3.1	Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2024	15

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
- Lampiran 2 Realisasi Anggaranbpk Perwakilan Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2022
- Lampiran 3 Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK. Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK.

AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-

Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa

Sesuai Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, AKN V membawahi dua Auditorat, satu sekretariat AKN dan 16 Perwakilan Wilayah Barat, satu di antaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara V, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Investigasi;
- p. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
- s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



Sesuai Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada dibawah AKN V. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara saat ini adalah Eydu Oktain Panjaitan. Unit kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

a. Subauditorat Sumatera Utara I;

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, dan Kota Binjai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Pada saat ini Kepala Subauditorat Sumatera I BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah Ramzuhri.

b. Subauditorat Sumatera Utara II;

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Gunung Sitoli, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Pada saat ini Kepala Subauditorat Sumatera II BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah Myrto Handayani.

c. Subauditorat Sumatera Utara III;

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kota Tanjung Balai, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Pada saat ini Kepala Subauditorat Sumatera III BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah Syafruddin Lubis.

d. Sekretariat Perwakilan;

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

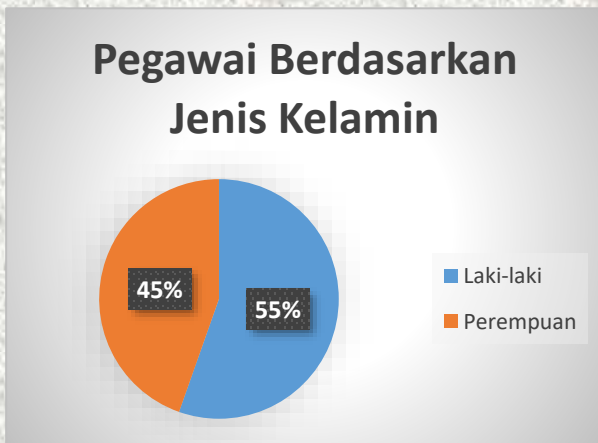
- 1) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan prasarana BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- 5) Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- 6) Penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
- 7) Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
- 8) Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara.

Pada saat ini Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah Rekson Pangaribuan.

4. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

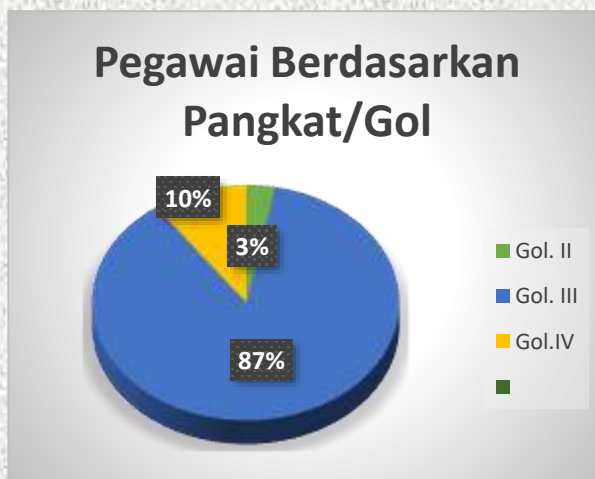
Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 231 orang pegawai, meliputi sepuluh personil struktural (eselon II s.d. eselon IV), 132 orang pada jabatan fungsional pemeriksa, lima orang pada jabatan fungsional lainnya, 25 orang pada jabatan pelaksana, serta 69 orang merupakan CPNS.



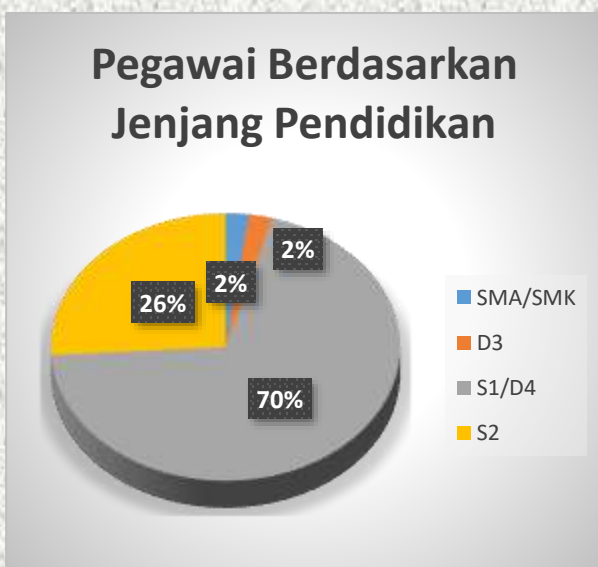
Berdasarkan jenis kelamin, Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memiliki pegawai Laki-laki sebanyak 128 orang atau 55% dari keseluruhan pegawai dan pegawai Perempuan sebanyak 103 orang atau 45% dari keseluruhan pegawai.

Gambar 1.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan pangkat/golongan, jumlah pegawai dengan golongan II sebanyak 7 orang atau 3% dari jumlah keseluruhan pegawai, golongan III sebanyak 201 orang atau 87%, dan golongan IV sebanyak 23 orang atau 10% dari keseluruhan pegawai



Gambar 1.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan



Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah pegawai dengan pendidikan SMA/SMK sebanyak 5 orang atau 2% dari jumlah keseluruhan pegawai, pendidikan D3 sebanyak 5 orang atau 2%, pendidikan S1 sebanyak 161 orang atau 70%, serta pendidikan S2 sebanyak 60 orang atau 26% dari keseluruhan pegawai.

Gambar 1.3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

b. Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memperoleh anggaran belanja sebesar Rp34.763.729.000,00, dan direvisi terakhir menjadi Rp37.294.699.000,00. Dari anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp37.014.129.184,00 atau 99,25%.

5. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- a. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan;
- b. Mengoptimalkan Penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian daerah;
- c. Pengimplementasian Sistem Merit (Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja) untuk perbaikan pengelolaan SDM BPK;
- d. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
- e. Peningkatan Penerapan *Knowledge Management* di Perwakilan;
- f. Peningkatan pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan peningkatan dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan.

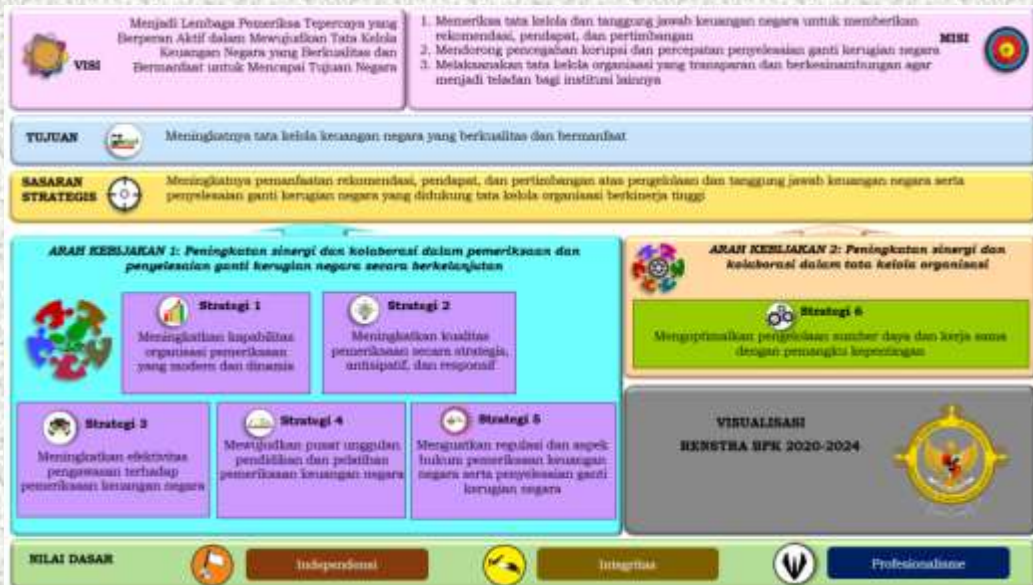
Bab II

Perencanaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

1. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis tersebut, BPK menetapkan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.1: Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan Auditorat Keuangan Negara V, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung strategi meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mempunyai 2 sasaran kegiatan, yaitu:

- a. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas;
- b. Meningkatnya layanan pemeriksaan.

Berikut merupakan visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024.



Gambar 2.2: Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

2. Target Kinerja

a. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Indikator Kinerja (IK) beserta target pencapaian IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara selaku pihak pertama, Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V) selaku pihak kedua, dan diketahui oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota V BPK RI.

b. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Dalam rangka mencapai target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, maka disusun rencana aksi pencapaian target kinerja Tahun 2022. Rencana aksi

di susun dengan membuat target yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, dan menyusun rencana kegiatan/aktivitas untuk mendukung pencapaian kinerja.

Untuk mencapai target IK Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pemeriksaan dengan mengacu para peraturan dan panduan dalam pemeriksaan, dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sehingga hasil pemeriksaan yang diperoleh berkualitas.

Untuk mencapai target IK tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pemeriksaan kinerja dan DTT sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Untuk mencapai target IK Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Kepala Perwakilan senantiasa mendorong Pemda untuk menyelesaikan rekomendasi BPK pada setiap even yang melibatkan Pemda di Sumatera Utara.

Untuk mencapai target IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara merealisasikan rencana pemeriksaan kinerja yang tertuang dalam RKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mencapai target IK Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari para pemangku kepentingan bila disetujui pimpinan BPK RI.

Untuk mencapai target IK Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk mengikuti survei PMPRB yang dilakukan oleh surveyor independen.

Untuk mencapai target IK Hasil Evaluasi AKIP, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan evaluasi mandiri atas AKIP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menggunakan aplikasi PRISMA-SAKIP.

Untuk mencapai target IK Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memaksimalkan penggunaan aplikasi internal BPK, baik untuk mendukung pemeriksaan/pemantauan, maupun tugas kesekretariatan.

Untuk mencapai target IK Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyusun laporan *best practice*

dan membuat beberapa kegiatan penerapan manajemen pengetahuan di Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mencapai target IK Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menjalin hubungan baik dengan para stakeholder, serta dilakukan survey terhadap *stakeholder* BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara oleh *surveyor* independen.

Untuk mencapai target IK Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan diklat sesuai dengan tupoksi minimal 20 JP untuk penunjang dan 40 JP untuk pemeriksa dalam setahun.

Untuk mencapai target IK Tingkat Kinerja Anggaran, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memaksimalkan pencapaian nilai kinerja anggaran, baik dari segi output, efisiensi, penyerapan, konsistensi, dan lainnya.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

1. Hasil Evaluasi AKIP

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai SAKIP sebesar **91,10** dengan **predikat AA (sangat memuaskan)**. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 87,67 dengan predikat A (memuaskan). Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tersebut, Itama merekomendasikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar melakukan perbaikan terhadap implementasi SAKIP mendatang dengan melakukan kegiatan sebagai berikut.

- a. Terkait pengukuran kinerja, agar Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM untuk melaksanakan monitoring pencapaian kinerja Eselon III, IV, dan individu.

Atas hal tersebut telah dilakukan koordinasi dengan PSMK terkait permasalahan ini. Namun sampai saat ini pelaksanaan monitoring kinerja Eselon III, IV, dan individu (dalam bentuk SKP) masih berupa penilaian secara tahunan. Kedepannya diharapkan monitoring kinerja Eselon III, IV dan individu bisa dilakukan semesteran, atau triwulanan.

- b. Terkait pelaporan kinerja, agar Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kualitas penyajian LAKIN dengan:
 - 1) Menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja;
 - 2) Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dikuantifikasikan untuk setiap indikator kinerja.

Atas hal tersebut BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyusun LAKIN Tahun 2022 dengan menyajikan evaluasi dan analisis capaian untuk seluruh IK, serta telah menyajikan analisis efisiensi capaian kinerja, baik dari pemanfaatan TI, pengelolaan BMN, dan efisiensi anggaran.

- c. Terkait capaian kinerja, agar Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kinerja sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat di capai dan meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan agar lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.

Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah berupaya meningkatkan capaian IK. Namun pada Tahun 2022 masih terdapat tiga komponen IK yang belum mencapai target, yaitu IK Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IK Indeks Implementasi Nilai Dasar, dan IK Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan

Informasi. Namun BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan berusaha untuk meningkatkan kinerja dan berusaha agar kinerja tahun 2023 lebih baik dari capaian tahun sebelumnya dengan melaksanakan kegiatan yang mendukung ketercapaian IK tersebut.

2. Capaian Kinerja

Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan 34 pemeriksaan atas LKPD di Sumatera Utara dan pemeriksaan kinerja LPAR pada Semester I, serta enam pemeriksaan DTT dan empat Kinerja pada Semester II Tahun 2022;
- b. Melaksanakan Pemantauan TLRHP BPK RI pada Semester I dan Semester II Tahun 2022;
- c. Melaksanakan Evaluasi Mandiri atas AKIP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menggunakan aplikasi PRISMA-SAKIP;
- d. Memaksimalkan penggunaan aplikasi internal BPK, baik aplikasi untuk kegiatan pemeriksaan (SiAP, SiPTL, dan SMP), maupun kegiatan kesekretariatan (JASMIN dan SISDM);
- e. Melaksanakan tujuh aktivitas Manajemen Pengetahuan dan menyusun *best practice* terkait kegiatan pemeriksaan;
- f. Mengikuti kegiatan survey PMPRB yang dilakukan oleh surveyor independen dengan PIC dari Direktorat PSMK;
- g. Melaksanakan diklat sesuai tupoksi pegawai, dengan jumlah jam diklat minimal 40 JP untuk pegawai pemeriksa dan 20 JP untuk pegawai penunjang;
- h. Memaksimalkan nilai kinerja anggaran perwakilan dengan memaksimalkan nilai output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi serta nilai lain yang mempengaruhi kinerja anggaran.

Pada Tahun 2022, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebesar **100,39**. Skor tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan skor kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 99,94. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.1 : Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2024

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa skor kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 sebesar 96,96, dan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 99,94 atau naik 2,98 poin, serta pada Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 100,39 atau naik 0,45 poin.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara diukur berdasarkan pencapaian atas 13 IK yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja, Target dan Capaian IK Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Skor
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	91,14%	91,14
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,55%	104,74
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,75%	100,75
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,96%	100,96
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (4,70)	94
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	AA (91,10)	103,52
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	92,99%	95,86
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	103,69%	103,69
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,93)	103,42
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100/
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90,78%	103,16
Skor Kinerja			100,39	

Adapun perbandingan realisasi IK Tahun 2022 dengan realisasi dua tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi IK Tahun 2022 dengan Dua Tahun Sebelumnya

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	91,14%	83,71%	77,94%
	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,55%	78,94%	81,13%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,75%	100,27%	100,93%
	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,05%	100%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,96%	100,69%	100%
	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (4,70)	Sangat memuaskan (4,50)	Sangat memuaskan (4,56)
	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	AA (91,10)	A (87,67)	A (88,62)
	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	92,99%	98,14%	98,14%
	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	103,69%	118,75%	50%
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,93)	Memuaskan (3,95)	Memuaskan (3,54)
	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020
	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90,78%	91,04%	93,56%

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi IK Tahun 2022 dengan Target Periode Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	91,14%	91,14%
2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	78,55%	104,73%
4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,75%	100,75%
5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,96%	100,96%
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (4,70)	94,00%
8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (86)	A (87)	A (88)	A (89)	AA (90,05)	AA (91,10)	101,17%

No	Indikator Kinerja	Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	92,99%	892,99%
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	103,69%	103,69%
11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,93)	103,42%
12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
13.	Tingkat Kinerja Anggaran	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	90,78%	105%

Rincian realisasi IK Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan. Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga sub penilaian yaitu internal satker melalui QA dan QC dan eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Adapun bobot untuk penilaian QA dan QC sebesar 40%, hasil evaluasi EPP sebesar 50%, dan hasil reviu itama sebesar 10%.

Pada Tahun 2022, pencapaian IKU ini mencapai 91,14%. Nilai ini diperoleh dengan komponen sebagai berikut.

Tabel 3.4 Komponen IK 1

No	Komponen IKU 1	Nilai	Bobot	skor
1	QA dan QC	100	40%	40,00%
2	Evaluasi EPP	82,28	50%	41,14%
3	Reviu Itama	100	10%	10,00%
	Jumlah			91,14%

Nilai QA dan QC berdasarkan aktivitas pemeriksaan yang telah dilakukan seluruhnya berdasarkan panduan pemeriksaan, serta melakukan pengisian lembar reviu atas pelaksanaan pemeriksaan oleh kepala perwakilan dan kepala subauditorat selaku PSP, dan pengendali mutu (penanggungjawab), pengendali teknis dan ketua tim selaku PFP. Pada lembar reviu tersebut

telah dilakukan pengisian lembar revidu seluruhnya, sehingga nilai komponen IKU ini 100.

Penilaian evaluasi EPP berdasarkan evaluasi atas akurasi dan konsistensi LHP LKPD TA 2022, dan evaluasi atas hal selain akurasi dan konsistensi. Sedangkan evaluasi atas revidu itama belum dilakukan pengukuran pada Tahun 2022, namun nilai komponen IK ini tetap dianggap 100.

Tabel 3.5 Perkembangan Capaian IK Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU. 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	77,94%	83,71%	91,14%		
Capaian	77,94	83,71	91,14		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			91,14%		

Realisasi IK Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada Tahun 2022 adalah sebesar 91,14% dari target 100%, sehingga capaiannya sebesar 91,14%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlunya dilakukan perbaikan kualitas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan perwakilan provinsi Sumatera Utara.

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut karena semakin berkurangnya koreksi atas akurasi dan konsistensi LHP LKPD TA 2022. Hal ini mengindikasikan semakin baiknya LHP yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk meningkatkan capaian atas IK Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan berupaya lebih meningkatkan kualitas pemeriksaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, sehingga kesalahan akurasi dan konsistensi terhadap LHP yang disusun dapat diminimalisir, diantaranya dengan melakukan *cross revidu* antar tim atas konsep LHP.

Realisasi IK Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada Tahun 2022 telah mencapai target 91,14% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IK ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

b. IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IK ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh satuan kerja pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program

Pemeriksaan (P2). Dengan adanya IK ini diharapkan satker pemeriksaan untuk terus meningkatkan kualitas LHP yang diterbitkan.

Tabel 3.6 Perkembangan Capaian IK Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU. 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100	100	100		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100%		

Realisasi IK Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pemeriksaan berpedoman pada Program Pemeriksaan (P2).

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan memedomani P2 yang telah disusun.

Untuk meningkatkan capaian atas IK Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan,

Realisasi IK Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada Tahun 2022 telah mencapai target 100% dari target Tahun 2024. Diharapkan target IK ini dapat dipertahankan sampai Tahun 2024.

c. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sehingga dengan pengukuran IK ini diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Tabel 3.7 Perkembangan Capaian IK Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IK. 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%

IK. 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	81,13%	78,94%	78,55%		
Capaian	108,17	105,25	104,74		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			104,74%		

Realisasi IK Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2022 adalah sebesar 78,55% dari target 75%, sehingga capaiannya sebesar 104,74%. Hal ini mengindikasikan semakin baiknya kesadaran Pemda di Sumatera Utara dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penambahan rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2022 yang belum selesai ditindaklanjuti, sehingga mengurangi persentase penyelesaian TLRHP.

Untuk meningkatkan capaian atas IK Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, para dosir entitas pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan senantiasa mendorong pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk lebih optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Realisasi IK Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2022 telah mencapai target 104,74% dari target Tahun 2024. Diharapkan target IK ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada Tahun 2024.

d. IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Tabel 3.8 Perkembangan Capaian IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IK. 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,97%	100,27%	100,75%		
Capaian	100,97	100,27	100,75		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,75%		

Realisasi IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional pada Tahun 2022 adalah sebesar 100,75% dari target 100%, sehingga capaiannya sebesar 100,75. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berhasil merealisasikan seluruh rencana pemeriksaan Kinerja khususnya tematik nasional yang tertuang dalam RKA perwakilan.

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya penambahan alokasi skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan kinerja.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian atas IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan berusaha untuk melaksanakan semua pemeriksaan kinerja tematik nasional sesuai rencana pada RKA Perwakilan.

Realisasi IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional pada Tahun 2022 telah mencapai target 100,75% dari target Tahun 2024. Diharapkan target IK ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada Tahun 2024.

e. IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Peningkatan pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Pada Tahun 2022 tidak ada permintaan pemeriksaan oleh lembaga perwakilan atau IPH.

Tabel 3.9 Perkembangan Capaian IK Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

IK.5	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan					
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,05%	100%		
Capaian	100	100,05	100		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100%		

Realisasi IK Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan pada Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target 100%, sehingga capaiannya sebesar 100. Hal ini dikarenakan ada atau tidak adanya permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan, nilai IK ini tetap 100%.

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan oleh pada Tahun 2021 ada penambahan alokasi skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan yang dilaksanakan oleh AUI.

Untuk meningkatkan capaian atas IK Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah membentuk tim IATF untuk membantu AUI dalam pemeriksaan investigatif. Sehingga dapat menambah skor IK ini.

Realisasi IK Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan pada Tahun 2022 telah mencapai target 100% dari target Tahun 2024. Diharapkan target IK ini dapat ditingkatkan pada Tahun 2024.

f. IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. IK ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 3.10 Perkembangan Capaian IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IK. 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,69%	100,96%		

Capaian	100%	100,69%	100,96	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,96%	

Realisasi IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada Tahun 2022 adalah sebesar 100,96% dari target 100%, sehingga capaiannya sebesar 100,96. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berhasil merealisasikan seluruh rencana pemeriksaan Kinerja khususnya tematik lokal yang tertuang dalam RKA perwakilan.

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya penambahan alokasi skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan kinerja.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian atas IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan berusaha untuk melaksanakan semua pemeriksaan kinerja tematik lokal sesuai rencana pada RKA Perwakilan.

Realisasi IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada Tahun 2022 telah mencapai target 100,96% dari target Tahun 2024. Diharapkan target IK ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada Tahun 2024.

g. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survey. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Survey dilakukan oleh surveyor independen dengan PIC Direktorat PSMK BPK RI.

Tabel 3.10 Perkembangan Capaian IK Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IK.7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Realisasi	4,56	4,5	4,7		
Capaian	91,20	90,00	94,00		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			94,00%		

Realisasi IK Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,7 dengan predikat sangat memuaskan dari target 5,0, sehingga capaiannya hanya sebesar 94%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang belum memahami implementasi nilai dasar BPK RI secara baik dan/atau ada pegawai yang tidak mengisi survey penilaian implementasi nilai dasar BPK..

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan semakin banyak pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang memahami implementasi nilai dasar BPK RI.

Untuk meningkatkan capaian atas IK Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan senantiasa mensosialisasikan nilai nilai dasar BPK RI dan pengimplementasiannya kepada seluruh pegawai, terutama kepada pegawai baru. Sehingga tujuan dari adanya IK ini, yaitu untuk mengembangkan budaya organisasi BPK dapat tercapai.

Realisasi IK Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada Tahun 2022 telah mencapai target 94% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IK ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

h. IK 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satuan kerja di BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK.

Tabel 3.11 Perkembangan Capaian IK Hasil Evaluasi AKIP

IK.8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86)	A (87)	A (88)	A (89)	AA (90)
Realisasi	A (88,62)	A (87,67)	AA (91,10)		
Capaian	103,05%	100,77%	103,52%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			101,22%		

Realisasi IK Hasil Evaluasi AKIP pada Tahun 2022 adalah sebesar 91,10 dengan predikat AA dari target 88 dengan predikat A, sehingga capaiannya sebesar 103,52%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya tingkat akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan semakin baiknya akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk meningkatkan capaian atas IK Hasil Evaluasi AKIP, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera akan semakin meningkatkan kinerja perwakilan.

Realisasi IK Hasil Evaluasi AKIP pada Tahun 2022 telah mencapai target 101,22% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IK ini dapat dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada Tahun 2024.

i. IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi layanan umum (Jasmin dan SiSDM), dan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, dan SiPTL) untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 3.12 Rincian Nilai IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

	SISDM (20%)	JASMIN (15%)	SMP (20%)	SiAP (20%)	SiPTL (25%)
Skor	100%	94,72%	96,88%	86,03%	88,79%
Nilai	20%	14,21%	19,38%	17,21%	22,20%
Total		92,99%			

Tabel 3.13 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IK.9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	100%
Realisasi	98,14%	98,14%	92,99%		
Capaian	103,31	102,23	95,86		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			92,99%		

Realisasi IK Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 92,99% dari target 97%, sehingga capaiannya sebesar 95,86. Hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya pegawai yang belum memaksimalkan penggunaan layanan TIK dalam pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari.

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan parameter penilaian IK TI pada tahun sebelumnya.

Untuk meningkatkan capaian atas IK Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Kepala Perwakilan akan menghimbau pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk lebih optimal dalam memanfaatkan layanan TIK BPK dalam pelaksanaan pekerjaannya masing-masing.

Realisasi IK Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada Tahun 2022 telah mencapai target 92,99% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IK ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

j. IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan merupakan upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*), penerapan *best practice*, dan aktivitas manajemen pengetahuan.

Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh unit/satuan kerja selain pengusul BP. Aktivitas manajemen pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan.

Tabel 3.14 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

IK.10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	50%	118,75%	103,69%		
Capaian	50%	105%	103,69%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			103,69%		

Realisasi IK Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Tahun 2022 adalah sebesar 103,69% dari target 100%, sehingga capaiannya sebesar 103,69. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sudah optimal dalam menerapkan manajemen pengetahuan di perwakilan.

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara membuat replikasi *best practice*, dimana pada Tahun 2022 tidak diusulkan.

Untuk meningkatkan capaian atas IK Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera pada tahun mendatang akan lebih memaksimalkan lagi penerapan manajemen pengetahuan di Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, serta mengusulkan *best practice*, dan

mereplikasi *best practice* atas usulan *best practice* yang telah disetujui Ditama Revbang.

Realisasi IK Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Tahun 2022 telah mencapai target 103,69% dari target Tahun 2024. Diharapkan target IK ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada Tahun 2024.

k. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. IKU ini bertujuan untuk mendorong perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan. Penilaian ini dilakukan oleh surveyor independen.

Tabel 3.15 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IK.11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Realisasi	3,54	3,95	3,93		
Capaian	93,16	103,95	103,42		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			103,42%		

Realisasi IK Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 3,93 dari target 3,8, sehingga capaiannya sebesar 103,42. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya kualitas komunikasi antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan *stakeholder*.

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh subjek yang mengisi survey serta parameter isian survey pada Tahun 2022 mungkin berbeda dengan Tahun 2021.

Untuk meningkatkan capaian atas IK Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan lebih optimal untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder*, serta memastikan pelaksanaan survey telah diikuti oleh seluruh pegawai.

Realisasi IK Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada Tahun 2022 telah mencapai target 103,42% dari target Tahun 2024. Diharapkan target IK ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada Tahun 2024.

1. IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, sumber daya manusia merupakan aset terpenting BPK. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Tabel 3.16 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IK.12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100%	100%	100%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100%		

Realisasi IK Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target 100%, sehingga capaiannya sebesar 100. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara baik pemeriksa maupun penunjang telah mematuhi kewajiban untuk memenuhi Jam diklatnya dalam setahun.

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih sama dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh Subbag SDM yang senantiasa memonitoring capaian jam diklat pegawai, dan mengusulkan diklat terhadap pegawai yang belum terpenuhi jam diklatnya.

Untuk meningkatkan capaian atas IK Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan terus konsisten untuk memonitoring capaian diklat pegawai Perwakilan Sumut.

Realisasi IK Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2022 telah mencapai target 100% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IK ini dapat dipertahankan pada Tahun 2024.

m. IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan BPK termasuk Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk mengoptimalkan

pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Tabel 3.17 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

IK.13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,5%	88%	84,5%	85,7%
Realisasi	93,56%	91,04%	90,78%		
Capaian	105	104,05	103,16		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			105%		

Realisasi IK Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran pada Tahun 2022 adalah sebesar 90,78% dari target 88%, sehingga capaiannya sebesar 103,16. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah optimal dalam melaksanakan pengelolaan anggaran perwakilan.

IK Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- 1) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan nilai 86,35%; dan
- 2) Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan nilai 97,43%.

Adapun rincian nilai EKA di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.18 – Rincian Nilai Komponen EKA
di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022**

Komponen Nilai Kinerja	Nilai	Bobot	Total
Penyerapan Anggaran	98,90%	9,70	9,59%
Konsistensi	99,87%	18,20	18,18%
Pencapaian Keluaran	100,00%	43,50	43,50%
Efisiensi	52,74%	28,60	15,08%
Nilai EKA			86,35%

Sedangkan rincian nilai EPA/IKPA BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di sajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.19 – Rincian Nilai Komponen EPA/IKPA
di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022**

No	Uraian	Nilai	Bobot	Total
1	Revisi DIPA	100%	10	10
2	Deviasi Halaman III	92,55%	10	9,255
3	Penyerapan Anggaran	100%	20	20
4	Belanja Kontraktual	85,28%	10	8,528
5	Penyelesaian Tagihan	100%	10	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	96,45%	10	9,645
7	Dispensasi SPM	100%	5	5
8	Capaian Output	100%	25	25
Nilai EPA/IKPA				97,43

Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sedikit lebih kecil dibandingkan nilai EKA tahun sebelumnya, dan target pada Tahun 2022 lebih besar dibandingkan target tahun sebelumnya.

Untuk meningkatkan capaian atas IK Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera akan berupaya untuk melaksanakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja anggaran, baik dari sisi penyerapan anggaran, output, efisiensi, ketepatan dalam menyampaikan LPJ, dan lainnya.

Realisasi IK Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran pada Tahun 2022 telah mencapai target 105% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IK ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada Tahun 2024.

3. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategi meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi, serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder, dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, dan efisiensi anggaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan TI memiliki peranan yang cukup besar untuk meningkatkan efisiensi dalam pencapaian IK BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya:

- 1) Pemanfaatan aplikasi zoom meeting dan semisalnya pada proses pemeriksaan, yang dapat mengefisienkan waktu pemeriksaan;

- 2) Pemanfaatan *Learning Management System (LMS)* pada kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat PKN, dapat mengefisienkan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan diklat;
- 3) Pemanfaatan aplikasi Jaringan Surat Menyurat kedinasan (JASMIN), dapat mengefisienkan waktu dan penggunaan ATK dalam kegiatan surat menyurat;
- 4) Pemanfaatan aplikasi SiPTL dalam aplikasi akan mengefisienkan waktu penyelesaian TLRHP BPK dan mengurangi penggunaan kertas (*paperless*);
- 5) Pemanfaatan aplikasi PRISMA-SAKIP, lebih memudahkan proses evaluasi AKIP, dimana evaluasi dapat dilakukan mandiri oleh satker, sehingga mempercepat proses evaluasi oleh Itama;
- 6) Pemanfaatan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dapat memudahkan kegiatan pencatatan pengelolaan keuangan mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran;
- 7) Pemanfaatan aplikasi SiAP, mempermudah proses langkah-langkah pemeriksaan, mempermudah penyimpanan KKP secara elektronik, serta mempermudah koreksi berjenjang.

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN juga memiliki peranan yang cukup besar untuk meningkatkan efisiensi dalam pencapaian IK BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya:

- 1) Melakukan penghapusan dengan pemusnahan atas dokumen perwakilan yang sudah melewati batas penghapusan dokumen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya pemeliharaan dokumen.
- 2) Melakukan pemeliharaan peralatan kantor secara berkala, untuk mengurangi potensi kerusakan berat, sehingga memperkecil biaya perbaikan;
- 3) Melakukan renovasi ruangan subauditorat, untuk memaksimalkan ruangan, sehingga cukup menampung seluruh pegawai pemeriksa, terutama setelah bertambahnya pegawai CPNS Tahun 2022 yang jumlahnya mencapai 69 orang.

c. Efisiensi Penggunaan Anggaran

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan beberapa kebijakan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran, namun tidak mengganggu kinerja Perwakilan, diantaranya:

- 1) Pengurangan jumlah hari pemeriksaan, dapat mengefisienkan penggunaan anggaran pemeriksaan, tanpa mengurangi kualitas laporan hasil pemeriksaan, sehingga dapat digunakan untuk menambah output pemeriksaan, khususnya pada semester II;
- 2) Melaksanakan kegiatan pemantauan atas kerugian daerah secara daring, dapat mengefisienkan penggunaan anggaran;

- 3) Melakukan konsinyering pelaporan hasil pemeriksaan dikantor, sehingga dapat mengefisienkan penggunaan anggaran, yang apabila dilakukan dihotel, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar.

4. Perubahan Budaya Kerja

Pada Tahun 2020, telah dibentuk budaya kerja baru di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan slogan “BPK Sumut berkhariaisma” dengan SK Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara nomor 28a/K/XVIII.MDN/08/2020. **BERKHARISMA** merupakan singkatan akronim dari:

- a. Hasil Pemeriksaan yang **BER**manfaat;
- b. Pegawai yang **K**ompeten;
- c. Hasil kerja yang **A**kurat;
- d. **R**esponsif pada kebutuhan masyarakat;
- e. **AntI** Suap;
- f. **MA**najemen waktu yang baik

Dengan dibentuknya budaya kerja “BPK Sumut Berkhariaisma” pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, memberikan perubahan peningkatan kinerja perwakilan, diantaranya:

- a. Realisasi IK Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan yang terus meningkat, dimana Tahun 2020 terealisasi 77,94%, lalu kembali meningkat pada Tahun 2021 menjadi 83,71%, dan meningkat lagi pada Tahun 2022 menjadi 91,14%;
- b. Realisasi IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional meningkat, dimana Tahun 2021 terealisasi 100,27%, meningkat pada Tahun 2022 menjadi 100,75%;
- c. Realisasi IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal yang terus meningkat, dimana Tahun 2020 terealisasi 100%, lalu kembali meningkat pada Tahun 2021 menjadi 100,69%, dan meningkat lagi pada Tahun 2022 menjadi 100,96%;
- d. Realisasi IK Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK meningkat, dimana Tahun 2021 terealisasi 4,5, meningkat pada Tahun 2022 menjadi 4,7;
- e. Realisasi IK Hasil Evaluasi AKIP yang terus meningkat, dimana Tahun 2020 terealisasi 88,62%, lalu kembali meningkat pada Tahun 2021 menjadi 87,67%, dan meningkat lagi pada Tahun 2022 menjadi 91,10%.

5. Realisasi Anggaran

Tabel berikut menyajikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.20 – Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja Perwakilan

No	Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output	Indikator Kinerja
1	13.577.480.000	13.453.463.936	2 LHP KAP, 32 LHP atas LKPD, 6 LHP DTT, dan 4 LHP Kinerja	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
				Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
				Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
				Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
				Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
2	273.004.000	261.982.629	68 laporan PTL	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
3	Anggaran BPK Pusat			Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
4	Anggaran BPK Pusat			Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
5	Anggaran BPK Pusat			Hasil Evaluasi AKIP
6	152.000.000	151.942.698	1 unit peralatan telekonferensi, 7 unit PC, 3 output scanner	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
7	179.139.000	179.089.923		Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
				Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
8				Tingkat Kinerja Anggaran

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada beberapa komponen IK yang tidak ada anggaran yang dibebankan, karena merupakan kegiatan yang dikelola oleh BPK Pusat, seperti Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, dan Hasil Evaluasi AKIP.

6. Perhargaan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memperoleh beberapa penghargaan pada Tahun 2022 baik eksternal maupun internal yaitu:

- a. Satker Tercepat I Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Mei 2022 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II
- b. Satker Tercepat I Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2022 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II;
- c. Satker Tercepat II Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2022 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II;
- d. Satker Tercepat II Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran bulan September 2022 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II;
- e. Pengelolaan BMN yang produktif 2022(*BMN award*) oleh KPKN Medan
- f. Juara 1 Lomba Poster Budaya Kerja;
- g. Juara 1 Lomba Video Hymne dan Mars BPK RI;
- h. Juara 2 Lomba Tiktok dg tema "Serunya Kerja di BPK";
- i. Juara 2 Lomba Foto HUT BPK RI.

Bab IV Penutup

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK RI. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian skor kinerja Tahun 2022 sebesar 100,39 mengalami peningkatan sebesar 0,45 poin dibandingkan tahun 2021 dengan skor kinerja sebesar 99,94.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian indikator kinerja, antara lain:

- a. IK Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan terealisasi 100%, dengan capaian 100% dari target Tahun 2022, dan sama dengan realisasi Tahun 2021;
- b. IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional terealisasi 100,75%, dengan capaian 100,75% dari target, dan naik 0,48 poin dari Tahun 2021 sebesar 100,27%;
- c. IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal terealisasi 100,96%, dengan capaian 100,96% dari target, dan naik 0,27 poin dari Tahun 2021 sebesar 100,69%;
- d. IK Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 terealisasi 91,10, naik 3,43 poin dari Tahun 2021 sebesar 87,67;
- e. IK Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan terealisasi 101,43%, dengan capaian 101,43% dari target 100%;
- f. IK Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi terealisasi 3,93, dengan capaian 103,42% dari target 3,8;
- g. IK Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi terealisasi 100%, dengan capaian 100% dari target 100%, dan sama dengan realisasi Tahun 2021;
- h. IK Tingkat Kinerja Anggaran terealisasi 90,78%, dengan capaian 103,16 dari target 88%.

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target sebagai berikut:

- a. IK Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2022 terealisasi sebesar 91,14%, dengan capaian 91,14% dari target 100%, namun meningkat 7,43 poin dari Tahun 2021 sebesar 83,71%;

- b. IK Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2022 terealisasi 4,7, dengan capaian 94% dari target 5,0, namun naik 0,2 poin dari Tahun 2021 sebesar 4,5;
- c. IK Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi terealisasi 92,99%, dengan capaian 95,86% dari target 97%.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut yakni, diantaranya:

- a. Jaringan kantor yang sering *low*, menyebabkan penggunaan aplikasi internal BPK menjadi terhambat;
- b. Surveyor merahasiakan nama-nama pegawai yang sudah mengisi kuesioner PMPRB. Hal ini menyebabkan perwakilan kesulitan untuk memonitor siapa saja pegawai yang telah mengisi dan belum;
- c. Proses validasi atas *update* data pada aplikasi SiPTL, terutama untuk pejabat pusat membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga data persentase TLRHP pada laporan monitoring triwulanan kinerja menggunakan data periode sebelumnya;

Atas indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan melakukan langkah-langkah atau rencana tindak lanjut, diantaranya:

- a. Meningkatkan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu atas LHP yang diterbitkan, diantaranya dengan melakukan *cross check* KHP sebelum dicetak dan disampaikan ke entitas;
- b. Melakukan sosialisasi atas implementasi nilai-nilai dasar BPK pada setiap even yang mengumpulkan seluruh pegawai perwakilan, dan memonitor dan memastikan seluruh pegawai perwakilan Provinsi Sumatera telah mengisi survey PMPRB;
- c. Memerintahkan seluruh pegawai untuk aktif dalam penggunaan aplikasi internal BPK, baik untuk kegiatan kesekretariatan, maupun kegiatan pemeriksaan/pemantauan.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas LHP yang diterbitkan;
- b. Terus mendorong pemda di Sumatera Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Utara;
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- d. Menggali prestasi perwakilan yang dapat diterapkan untuk menjadi aktivitas manajemen pengetahuan;
- e. Memaksimalkan penggunaan TI perwakilan.

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

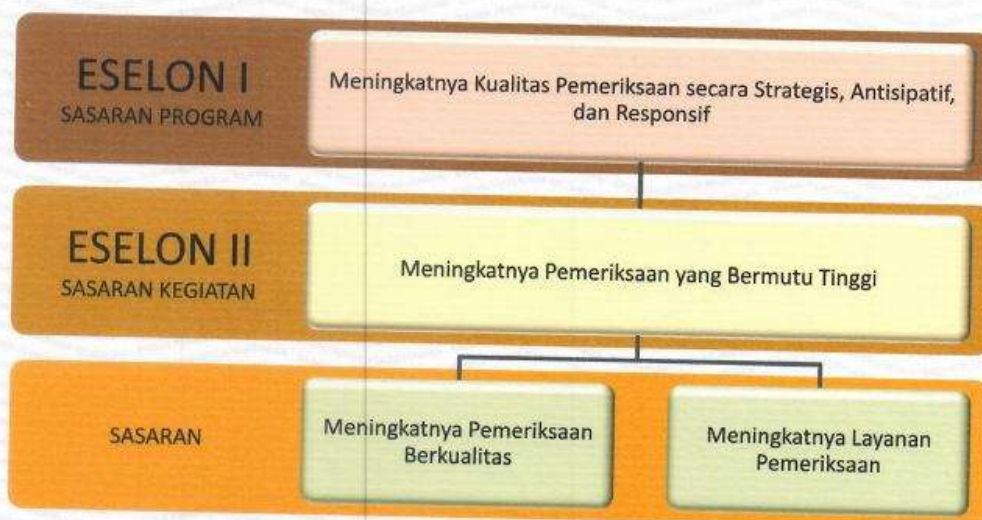
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

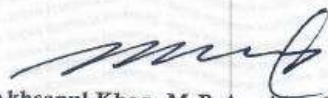


INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan Rp34.763.729.000 Rp14.684.778.000 Rp20.078.951.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,



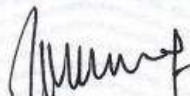
Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., Ak., CFE.,
CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.

Pihak Pertama,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak.,
CA., CSFA.

Diketahui oleh:
Plt. Anggota V BPK,



Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.

Wakil Ketua BPK,



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.,
CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.

Ketua BPK,



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.,
CFrA., CGCAE., QGIA.

Lampiran 2: Realisasi Anggaranbpk Perwakilan Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2022

No	Kode	Program/Kegiatan/Keluaran/Subkeluaran	Anggaran		
			Rencana	Realisasi s.d. Bulan Ini (Rp)	Realisasi (%)
	CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	37.294.699.000	37.014.129.184	99,25%
	1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	37.294.699.000	37.014.129.184	99,25%
1	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	152.000.000	151.942.698	99,96%
	001	<i>Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	152.000.000	151.942.698	99,96%
	051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	152.000.000	151.942.698	99,96%
	A	Tanpa Subkomponen	152.000.000	151.942.698	99,96%
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.000.000	151.942.698	99,96%
2	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.233.580.000	20.165.840.104	99,67%
	994	<i>Layanan Perkantoran</i>	20.233.580.000	20.165.840.104	99,67%
	001	Gaji dan Tunjangan	13.504.536.000	13.504.500.324	100,00%
	A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	13.504.536.000	13.504.500.324	100,00%
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9.602.819.000	9.602.817.000	100,00%
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	172.000	170.303	99,01%
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	543.821.000	543.819.198	100,00%
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	174.077.000	174.076.194	100,00%
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	132.420.000	132.420.000	100,00%
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	568.790.000	568.790.000	100,00%
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	13.245.000	13.243.389	99,99%
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	515.776.000	515.775.240	100,00%
	511129	Belanja Uang Makan PNS	1.552.652.000	1.552.630.000	100,00%
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	166.425.000	166.425.000	100,00%
	512211	Belanja uang lembur	234.339.000	234.334.000	100,00%
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.729.044.000	6.661.339.780	98,99%
	A	Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan	350.102.000	320.955.957	91,67%
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	30.080.000	30.037.320	99,86%
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	49.560.000	34.961.500	70,54%
	522141	Belanja Sewa	59.830.000	47.249.800	78,97%
	524111	Belanja perjalanan biasa	207.932.000	206.007.337	99,07%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000	2.700.000	100,00%
	B	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	38.400.000	38.400.000	100,00%
	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	38.400.000	38.400.000	100,00%
	C	Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	907.469.000	888.560.773	97,92%
	521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	606.960.000	606.622.200	99,94%
	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	171.899.000	171.898.573	100,00%

No	Kode	Program/Kegiatan/Keluaran/Subkeluaran	Anggaran		
			Rencana	Realisasi s.d. Bulan Ini (Rp)	Realisasi (%)
	522191	Belanja Jasa Lainnya	84.590.000	84.590.000	100,00%
	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	44.020.000	25.450.000	57,81%
	D	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	277.920.000	265.154.000	95,41%
	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	277.920.000	265.154.000	95,41%
	E	Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	5.035.140.000	5.028.273.600	99,86%
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	279.963.000	279.908.656	99,98%
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9.216.000	9.193.270	99,75%
	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	15.000.000	11.447.000	76,31%
	521213	Honor Output Kegiatan	2.160.000	2.160.000	100,00%
	522111	Belanja Langganan Listrik	1.579.980.000	1.578.511.462	99,91%
	522112	Belanja Langganan Telepon	75.160.000	73.854.456	98,26%
	522113	Belanja Langganan Air	100.000.000	99.746.994	99,75%
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.195.104.000	2.194.915.259	99,99%
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	619.837.000	619.836.503	100,00%
	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	158.720.000	158.700.000	99,99%
	F	Layanan Dukungan Kesekretariatan Perwakilan	120.013.000	119.995.450	99,99%
	521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	69.346.000	69.344.000	100,00%
	521211	Belanja Bahan	50.667.000	50.651.450	99,97%
3	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	134.500.000	134.499.999	100,00%
	951	Layanan Sarana Internal	134.500.000	134.499.999	100,00%
	052	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	134.500.000	134.499.999	100,00%
	A	Tanpa Subkomponen	134.500.000	134.499.999	100,00%
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.500.000	134.499.999	100,00%
4	FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara	16.774.619.000	16.561.846.383	98,73%
	051	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	359.398.000	357.796.587	99,55%
	051	Melaksanakan Pemeriksaan Banparpol	359.398.000	357.796.587	99,55%
	A	Tanpa Subkomponen	359.398.000	357.796.587	99,55%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	102.940.000	101.339.070	98,44%
	524111	Belanja perjalanan biasa	256.458.000	256.457.517	100,00%
	059	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	1.216.559.000	1.216.558.795	100,00%
	051	Melaksanakan Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK	1.216.559.000	1.216.558.795	100,00%
	A	Tanpa Subkomponen	1.216.559.000	1.216.558.795	100,00%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27.650.000	27.650.000	100,00%
	522131	Belanja Jasa Konsultan	592.020.000	592.020.000	100,00%

No	Kode	Program/Kegiatan/Keluaran/Subkeluaran	Anggaran		
			Rencana	Realisasi s.d. Bulan Ini (Rp)	Realisasi (%)
	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	654.000	654.000	100,00%
	524111	Belanja perjalanan biasa	492.255.000	492.254.795	100,00%
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	103.980.000	103.980.000	100,00%
	083	<i>Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan</i>	9.984.000	9.930.000	99,46%
	051	Menyusun Bahan Rumusan Pendapat	9.984.000	9.930.000	99,46%
	A	Tanpa Subkomponen	9.984.000	9.930.000	99,46%
	521211	Belanja Bahan	1.280.000	1.235.000	96,48%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.000.000	5.991.000	99,85%
	524111	Belanja perjalanan biasa	2.704.000	2.704.000	100,00%
	091	<i>Sumbangan IHPS Perwakilan</i>	43.932.000	43.602.901	99,25%
	051	Menyusun Sumbangan IHPS	43.932.000	43.602.901	99,25%
	A	Tanpa Subkomponen	43.932.000	43.602.901	99,25%
	521211	Belanja Bahan	3.634.000	3.328.000	91,58%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.000.000	2.980.000	99,33%
	524111	Belanja perjalanan biasa	37.298.000	37.294.901	99,99%
	099	<i>Laporan Profil Entitas Perwakilan</i>	5.650.000	4.201.000	74,35%
	051	Menyusun Laporan Profil Entitas	5.650.000	4.201.000	74,35%
	A	Tanpa Subkomponen	5.650.000	4.201.000	74,35%
	521211	Belanja Bahan	5.200.000	4.201.000	80,79%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000	0	0,00%
	116	<i>Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan</i>	273.004.000	261.982.629	95,96%
	051	Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	273.004.000	261.982.629	95,96%
	A	Tanpa Subkomponen	273.004.000	261.982.629	95,96%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	273.004.000	261.982.629	95,96%
	124	<i>Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan</i>	347.601.000	320.965.239	92,34%
	051	Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	347.601.000	320.965.239	92,34%
	A	Tanpa Subkomponen	347.601.000	320.965.239	92,34%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	288.128.000	273.043.302	94,76%
	524111	Belanja perjalanan biasa	59.473.000	47.921.937	80,58%
	174	<i>Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan</i>	402.709.000	397.534.961	98,72%
	051	Melaksanakan Dukungan Manajemen Pemeriksaan	402.709.000	397.534.961	98,72%
	A	Melaksanakan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan	134.966.000	134.468.200	99,63%
	521211	Belanja Bahan	103.616.000	103.577.200	99,96%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30.000.000	29.541.000	98,47%

No	Kode	Program/Kegiatan/Keluaran/Subkeluaran	Anggaran		
			Rencana	Realisasi s.d. Bulan Ini (Rp)	Realisasi (%)
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000	1.350.000	100,00%
	B	Melaksanakan Konsultasi/Koordinasi/ Bimbingan Teknis Pemeriksaan	197.339.000	197.334.133	100,00%
	524111	Belanja perjalanan biasa	197.339.000	197.334.133	100,00%
	C	Melaksanakan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	17.246.000	17.234.050	99,93%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.000.000	1.990.000	99,50%
	524111	Belanja perjalanan biasa	15.246.000	15.244.050	99,99%
	D	Melaksanakan Reviu atas Hasil Pemeriksaan	34.692.000	30.185.928	87,01%
	521211	Belanja Bahan	17.024.000	12.934.228	75,98%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.000.000	1.996.000	99,80%
	524111	Belanja perjalanan biasa	15.668.000	15.255.700	97,37%
	E	Melaksanakan Pengelolaan Manajemen SIKAD	18.466.000	18.312.650	99,17%
	521211	Belanja Bahan	2.880.000	2.735.000	94,97%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.000.000	1.993.000	99,65%
	524111	Belanja perjalanan biasa	13.586.000	13.584.650	99,99%
	175	<i>Layanan Manajemen Internal Perwakilan</i>	<i>1.754.861.000</i>	<i>1.712.369.130</i>	<i>97,58%</i>
	051	Melaksanakan Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.754.861.000	1.712.369.130	97,58%
	A	Melaksanakan Layanan Tata Usaha	24.300.000	21.926.100	90,23%
	521211	Belanja Bahan	1.300.000	1.300.000	100,00%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20.000.000	19.276.100	96,38%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	1.350.000	45,00%
	B	Melaksanakan Layanan Kehumasan	265.111.000	240.115.955	90,57%
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	30.720.000	29.886.800	97,29%
	521211	Belanja Bahan	17.844.000	17.729.450	99,36%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8.807.000	8.350.500	94,82%
	524111	Belanja perjalanan biasa	201.440.000	177.849.205	88,29%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000	6.300.000	100,00%
	C	Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia	565.727.000	563.079.219	99,53%
	521211	Belanja Bahan	179.139.000	179.089.923	99,97%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.750.000	13.750.000	100,00%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	85.800.000	85.775.000	99,97%
	522151	Belanja Jasa Profesi	3.600.000	2.400.000	66,67%
	524111	Belanja perjalanan biasa	265.738.000	264.364.296	99,48%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.700.000	17.700.000	100,00%
	D	Melaksanakan Layanan Keuangan	363.302.000	361.151.160	99,41%
	521211	Belanja Bahan	47.886.000	47.877.000	99,98%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	98.000.000	97.994.900	99,99%
	524111	Belanja perjalanan biasa	193.116.000	190.979.260	98,89%

No	Kode	Program/Kegiatan/Keluaran/Subkeluaran	Anggaran		
			Rencana	Realisasi s.d. Bulan Ini (Rp)	Realisasi (%)
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.300.000	24.300.000	100,00%
	E	Melaksanakan Layanan Umum dan TI	185.841.000	183.325.950	98,65%
	521211	Belanja Bahan	15.344.000	14.469.750	94,30%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	58.000.000	57.211.300	98,64%
	524111	Belanja perjalanan biasa	104.847.000	104.144.900	99,33%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.650.000	7.500.000	98,04%
	F	Melaksanakan Layanan Hukum	238.584.000	236.651.643	99,19%
	521211	Belanja Bahan	14.144.000	14.143.074	99,99%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12.710.000	12.709.250	99,99%
	524111	Belanja perjalanan biasa	211.280.000	209.349.319	99,09%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000	450.000	100,00%
	G	Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK	74.580.000	69.758.603	93,54%
	521211	Belanja Bahan	46.380.000	42.429.603	91,48%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	17.000.000	16.439.000	96,70%
	524111	Belanja perjalanan biasa	10.000.000	9.990.000	99,90%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	900.000	75,00%
	H	Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	37.416.000	36.360.500	97,18%
	521211	Belanja Bahan	7.506.000	6.941.400	92,48%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.000.000	5.518.000	91,97%
	524111	Belanja perjalanan biasa	23.910.000	23.901.100	99,96%
	<i>U09</i>	<i>LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</i>	<i>7.099.955.000</i>	<i>6.991.441.497</i>	<i>98,47%</i>
	052	Melaksanakan Pemeriksaan	6.945.859.000	6.854.968.112	98,69%
	A	Tanpa Subkomponen	5.760.177.000	5.670.987.573	98,45%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	895.340.000	830.589.303	92,77%
	522191	Belanja Jasa Lainnya	100.000.000	90.541.141	90,54%
	524111	Belanja perjalanan biasa	4.764.837.000	4.749.857.129	99,69%
	B	Tanpa Subkomponen (Tambahkan BA BUN)	1.185.682.000	1.183.980.539	99,86%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	212.948.000	211.249.000	99,20%
	522191	Belanja Jasa Lainnya	85.206.000	85.204.039	100,00%
	524111	Belanja perjalanan biasa	887.528.000	887.527.500	100,00%
	053	Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan	154.096.000	136.473.385	88,56%
	A	Tanpa Subkomponen	141.781.000	124.253.344	87,64%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	141.781.000	124.253.344	87,64%
	B	Tanpa Subkomponen (Tambahkan BA BUN)	12.315.000	12.220.041	99,23%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.315.000	12.220.041	99,23%
	<i>U57</i>	<i>LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</i>	<i>5.260.966.000</i>	<i>5.245.463.644</i>	<i>99,71%</i>
	051	Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan	5.260.966.000	5.245.463.644	99,71%

No	Kode	Program/Kegiatan/Keluaran/Subkeluaran	Anggaran		
			Rencana	Realisasi s.d. Bulan Ini (Rp)	Realisasi (%)
	A	Tanpa Subkomponen	5.260.966.000	5.245.463.644	99,71%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	623.933.000	623.929.948	100,00%
	522191	Belanja Jasa Lainnya	675.240.000	675.202.343	99,99%
	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	23.652.000	23.652.000	100,00%
	524111	Belanja perjalanan biasa	3.938.141.000	3.922.679.353	99,61%

Lampiran 3: Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IK 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember 2022	<p>Januari-Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP), Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Tim Perencanaan dan Pengkajian Hasil Pemeriksaan (TPPHP) Meningkatkan QC dari KT, PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I <p>April-Juni</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas 34 entitas dan Pemeriksaan Kinerja LFAR oleh PSP, PFP, dan TPPHP Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan sesuai panduan <p>Juli-September</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) Meningkatkan QC dari KT, PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II <p>Oktober-Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Kinerja dan PDDT Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan sesuai dengan panduan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IK 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2022	<p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan rapat koordinasi rencana pelaksanaan pemeriksaan Semester I Tahun 2022 dengan Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP) Perwakilan Sumut Menyusun P2 Pemeriksaan terinci LKPD <p>Februari-Juni</p> <p>Melaksanakan pemeriksaan interim dan terinci LKPD dan kinerja LFAR serta membuat kesimpulan sesuai dengan harapan penugasan sebagaimana dalam P2</p> <p>Juli</p> <p>Melakukan rapat koordinasi rencana pelaksanaan pemeriksaan Semester III Tahun 2022 dengan PSP Perwakilan Sumut</p> <p>Agustus</p> <p>Menyusun P2 Pemeriksaan Semester II Tahun 2022</p> <p>September-Desember</p> <p>Melaksanakan pemeriksaan Semester II serta membuat kesimpulan sesuai dengan harapan penugasan sebagaimana dalam P2</p>
IK 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember 2022	<p>Januari-Juni</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong Pemda untuk menyelesaikan rekomendasi BPK pada setiap even yang melibatkan Pemda di Sumatera Utara Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL Semester I Tahun 2022 Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL <p>Juli-Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong Pemda untuk menyelesaikan rekomendasi BPK pada setiap even yang melibatkan Pemda di Sumatera Utara Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL Semester II Tahun 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
(1)	(2)		(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)		
								<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL
IK 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2022	<p>Januari-Juni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional <p>Juli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan workshop persiapan pemeriksaan kinerja tematik nasional • Menyusun P2 pemeriksaan pendahuluan kinerja; <p>Agustus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeriksaan Pendahuluan kinerja tematik nasional; • Menyusun LHP Pendahuluan. <p>September-November</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun P2 Pemeriksaan kinerja tematik nasional; • Melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik nasional <p>Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun LHP pemeriksaan kinerja tematik nasional
IK 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember 2022	<p>Januari-Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan peninjauan atas permintaan pemeriksaan oleh pemangku kepentingan dan melaporkan ke BPK Pusat(bila terdapat permintaan pemeriksaan) • Melakukan perencanaan anggaran (revisi anggaran) jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang disetujui BPK Pusat • Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan • Melaksanakan pemeriksaan • Menyusun LHP
IK 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2022	<p>Januari-Juni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal <p>Juli</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemeriksaan Tematik Lokal							<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan workshop persiapan pemeriksaan kinerja tematik lokal Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal Menyusun P2 pemeriksaan pendahuluan kinerja; <p>Agustus</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan Pendahuluan kinerja tematik lokal; Menyusun LHP Pendahuluan. <p>September-November</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun P2 Pemeriksaan kinerja tematik lokal; Melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik lokal <p>Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun LHP pemeriksaan kinerja tematik lokal
IK 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat memuaskan (5,00)	0%	0%	0%	Sangat memuaskan (5,00)	Desember 2022	<p>Januari-September</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD. Sosialisasi terhadap visi, misi, dan Nilai dasar, serta kode etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan oleh perwakilan. Membuat Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD Sosialisasi terhadap visi, misi, dan Nilai dasar, serta kode etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan oleh perwakilan. Membuat Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan Kinerja dan PDDT <p>Oktober-Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti survei terkait pemahaman terhadap visi, misi, nilai dasar, dan kode etik BPK yang dilaksanakan oleh surveyor independen yang ditunjuk BPK
IK 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	-	A (88,00)	Desember 2022	<p>Januari-Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2021

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022 • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku <p>April</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan evaluasi mandiri pada aplikasi E-SAKIP dan menyampaikan dokumen pendukung kepada Itama untuk proses evaluasi tersebut • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku • Menyusun laporan monitoring realisasi target kinerja Triwulan I <p>Mei-Juli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku • Menyusun laporan monitoring realisasi target kinerja Triwulan II <p>Agustus-Oktober</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku • Menyusun laporan monitoring realisasi target kinerja Triwulan III <p>November-Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku • Mengumpulkan data pendukung untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022
IK 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	25%	50%	75%	97%	Desember 2022	<p>Januari-Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan mendorong seluruh pegawai untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi internal BPK (e-mail, e-drive, portal, sisdm, SMP, SiAP, dan SiPTL). • Pegawai memaksimalkan pemanfaatan aplikasi internal BPK (e-mail, e-drive, portal, sisdm, SMP, SiAP, dan SiPTL)

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IK 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	12,50%	25%	37,50%	100%	Desember 2022	<p>Januari-Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agen pengetahuan Mengidentifikasi praktik terbaik (<i>best practice</i>) yang telah di lakukan di perwakilan sumut • Melaksanakan aktivitas <i>Knowledge management</i> (misal : Diklat, dll) <p>April-Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agen pengetahuan membentuk tim penyusun laporan praktik terbaik • Melaksanakan aktivitas <i>Knowledge management</i> (misal : bantuan rekan sejawat, dll) <p>Juli-September:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan dan dokumen pendukung praktik terbaik yang telah dipilih; Melaksanakan aktivitas <i>Knowledge management</i> (misal : mentoring, dll) <p>Oktober-Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan praktik terbaik yang telah disusun ke Direktorat PSMK; • Mereplikasi salah satu <i>best practice</i> satker lain yang telah disetujui oleh PSMK • Melaksanakan aktivitas <i>Knowledge management</i> (misal :KTF, dll)
IK 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	0%	0%	0%	Memuaskan (3,80)	Desember 2022	<p>Januari-Oktober</p> <p>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan Sumatera Utara, salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit</p> <p>November-Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan Sumatera Utara • Melakukan survei kepada para pemangku kepentingan terkait kepuasan mereka terhadap hubungan kerjasama dan komunikasi dengan perwakilan yang dilaksanakan oleh surveyor independen yang dipilih BPK

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
IK 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	70%	80%	90%	100%	Desember 2022	<p>Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Diklat LKPD bagi pegawai yang akan melaksanakan pemeriksaan • Memonitoring Pegawai yang belum terpenuhi pemenuhan jam diklat <p>Februari-Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 40 jam pelajaran dalam 1 tahun. • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. • Memonitoring Pegawai yang belum terpenuhi pemenuhan jam diklat • Mengajukan diklat, KTF, atau workshop terhadap pegawai yang belum memenuhi jam diklat ke Badan Diklat BPK RI
IK 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%	88%	88%	88%	Desember 2022	<p>Januari-Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2021 dan Kebijakan TA. 2021 • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran • Menyusun data capaian kinerja anggaran melalui laporan bulanan. • Evaluasi atas capaian kinerja anggaran Perwakilan Triwulan I Tahun 2022 <p>April-Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun data capaian kinerja anggaran melalui laporan bulanan. • Evaluasi atas capaian kinerja anggaran Perwakilan Triwulan II, III, dan IV.

